



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURJAHMAN, SP., MM
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 408907

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.778.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m²/100 m² di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m² di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m² di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 7975 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 800.000.000
5. Tanah Seluas 800 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
6. Tanah Seluas 500 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
7. Tanah Seluas 1400 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 98.000.000
8. Tanah Seluas 8750 m² di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
9. Tanah Seluas 15000 m² di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
10. Tanah Seluas 10000 m² di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 21.000.000**



1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 66.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.302.868

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.871.302.868

III. HUTANG Rp. 320.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.551.302.868

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.